



Siaran Pers: ARUKI Mengecam Tindakan Kekerasan Aparat Terhadap Masyarakat Sipil



Jakarta, 29 Agustus 2025 – Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) mengecam keras tindakan kekerasan aparat kepolisian dalam pembubaran aksi massa pada 25-29 Agustus 2025. Kekerasan ini memperlihatkan pola pelanggaran hak masyarakat sipil yang semakin brutal hingga merenggut nyawa seorang buruh ojek online, Affan Kurniawan.

Dalam pembubaran aksi tersebut, aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap anak-anak tanpa pendampingan orang tua maupun kuasa hukum, menghalangi dan melukai jurnalis yang bertugas, merusak ambulans, mengintimidasi tenaga medis serta melakukan kekerasan yang disengaja terhadap massa aksi.

Tindakan represif dan brutalisme aparat kepolisian selama aksi demonstrasi sejak 25 sampai 29 Agustus 2025 adalah bentuk penghalang-halangan terhadap ruang demokrasi. Padahal, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat merupakan reaksi atas kesewenang-wenangan penguasa dan kebijakan yang tidak mencerminkan keadilan bagi rakyat.



Respons represif aparat terhadap masyarakat menunjukkan bahwa negara semakin anti terhadap kritik rakyat. Kekerasan ini bukan hanya melanggar hak demokrasi, tapi juga mempersempit ruang kebebasan berekspresi yang seharusnya dijamin. Negara semestinya hadir melindungi, bukan justru menakut-nakuti masyarakatnya

Risma Umar – Aksi! For Gender and Ecological Justice.



Kekerasan aparat ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Pola serupa selalu berulang setiap kali masyarakat melakukan aksi damai. Padahal, mereka turun ke jalan hanya untuk menuntut hak yang dijamin oleh konstitusi, yakni hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk hidup layak, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tindakan represif ini jelas tidak proporsional dan sangat berdampak juga utamanya pada kelompok rentan yang suaranya justru harus dilindungi negara.

Bersamaan dengan aksi kemarin, ARUKI juga melakukan Pawai Rakyat untuk Keadilan Iklim yang dilaksanakan pukul 09.00-12.00 WIB. Namun, massa pawai yang didominasi kelompok rentan, diantaranya masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, buruh, miskin kota, orang muda, hingga penyandang disabilitas, justru dihadang. Dengan ini, terlihat sangat jelas bagaimana ruang demokrasi semakin disempitkan dengan cara-cara represif.

ARUKI menegaskan bahwa tindakan kekerasan aparat adalah bentuk pembungkaman terhadap suara rakyat. Aparat yang seharusnya melindungi justru menjadi ancaman nyata bagi mereka yang memperjuangkan hak-haknya. Keadilan tidak akan pernah terwujud jika ruang demokrasi untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terus ditutup dengan kekerasan



Oleh karena itu, ARUKI menuntut:

1. Hentikan semua bentuk tindakan kekerasan aparat terhadap masyarakat sipil sekarang dan seterusnya;
2. Tindak aparat pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil, usut tuntas dan adili secara transparan;
3. Kepolisian RI untuk segera bebaskan seluruh demonstran yang ditangkap sebagai bentuk perlindungan terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum;
4. Presiden harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kapolri dan institusi Polri yang dilanjutkan dengan percepatan agenda reformasi kepolisian.
5. Presiden dan DPR segera penuhi tuntutan demonstran, mulai dari mengatasi krisis lapangan kerja, hentikan semua program strategis nasional maupun program pemerintah yang merusak lingkungan serta menghentikan praktik perampasan hak hidup masyarakat adat.

Indonesia menghadapi ancaman serius bencana iklim yang termanifestasikan dalam berbagai rentetan peristiwa sejak dari banjir, longsor, kekeringan, badai hingga kenaikan muka air laut yang memperparah krisis. Bencana iklim yang melanda kian mengalami intensitasnya pada dekade ini dan berdampak terhadap keselamatan, keamanan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pembangunan negara-negara di dunia, termasuk di dalamnya yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, yang menggunakan pilihan model pembangunan ekstraktif dengan mengeksploitasi sumber daya alam telah sedemikian mendorong pelepasan emisi secara lebih masif dan meninggalkan dampak yang tidak merata terhadap kehidupan manusia. Dalam situasi di mana intensitas bencana iklim melanda, kelompok rentan merasakan dampak terburuknya.

Dengan berbekal kerja selama puluhan tahun dalam bidang ekologi, lingkungan hidup serta penguatan resiliensi warga, sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia berupaya untuk merespon situasi ancaman krisis dan bencana iklim tersebut dengan mengajukan dan mendesak sebuah tuntutan yang lebih sistematis dan konstruktif dalam mengupayakan jalan keluar terbaik kepada pemerintah Indonesia dalam mengatasi persoalan krisis iklim. Adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), serta Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (PIKUL) menginisiasi awal tuntutan tersebut melalui dirilisnya Kertas Posisi Keadilan Iklim. Kertas posisi tersebut telah meletakkan sejumlah garis besar persoalan ketidakadilan iklim dan jawaban atas pertanyaan mengapa tuntutan terhadap tersedianya instrumen hukum tertinggi yang dapat mendorong kolaborasi harmonisasi antar pihak secara lebih komprehensif melalui Undang-Undang Keadilan Iklim merupakan sebuah hal yang niscaya.



Pemerintah Indonesia menggelar Konsultasi Publik *Indonesia's Second Nationally Determined Contribution (SNDC)* di Jakarta, 23 Oktober 2025.

Dokumen ini menjadi pembaruan komitmen iklim nasional, sesuai mandat **Paris Agreement**.

Namun, **Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI)** menilai komitmen tersebut belum menjawab tuntutan keadilan iklim dan partisipasi bermakna.



"Alih-alih menempatkan krisis iklim sebagai persoalan keadilan, dokumen SNDC masih didekati sebagai tantangan pembangunan yang harus dikelola secara teknokratis. Pendekatan ini mengabaikan kenyataan bahwa krisis iklim merupakan manifestasi dari ketidakadilan struktural, di mana sistem ekonomi yang eksploitatif memperdalam ketimpangan dan menghancurkan ruang hidup masyarakat"

**Boy Jerry Even Sembiring, Direktur
Eksekutif Nasional WALHI.**